

ABSTRAK

Tindak pidana *illegal logging* adalah tindak kejahatan terhadap kerusakan hutan dalam hal bidang kehutanan. Dimana kejahatannya meliputi penebangan kayu yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan secara tidak sah atau tanpa izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Saat ini di Indonesia, kejahatan *illegal logging* menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit di berantas. Semakin maraknya kasus *illegal logging*, tentunya membutuhkan peranan penting dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik polri, kejaksaan maupun hakim. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini adalah : 1) untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; dan 2) untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging*.

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulisan yang tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan prinsip-prinsip dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah, melainkan penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* pada putusan perkara pidana nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN PtI yakni Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2) Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah dari penggalian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Kata Kunci : Penerapan sanksi pidana, pelaku, *Illegal Logging*

ABSTRACT

Criminal acts of illegal logging are crimes against forest damage in the field of forestry. Where crimes include logging carried out in forest areas by unauthorized or without permission from the government or authorities. Currently in Indonesia, illegal logging crime becomes one of the tough and difficult crimes in the rise of illegal logging cases, of course, requires an important role of law enforcement officials in this case police investigators, prosecutors and Judge. The purpose and usefulness of this study of thesis is: 1) to know the application of criminal sanctions against illegal logging perpetrators under law No. 18 of 2013; and 2) to find out what is the basis of the judgment of judges in the decision to impose criminal acts on illegal logging.

The research method used in drafting the writing of this thesis using sociological juridical approach, which is writing that not only use legislation, principles of law and principles in reviewing, See and analyze the problems, but this research also review how it is in practice.

The results of this writing show that: 1) the application of criminal sanctions against illegal logging perpetrators of criminal matter number: 95/Pid. Sus/2017/PN Pt. The defendant has fulfilled the elements in the indictment of Article 82 paragraph (1) B Law of the Republic of Indonesia number 18 year 2013 concerning the prevention and eradication of Forest Jo article 55 paragraph (1) of the 1st PENAL code. 2) The basic consideration of the judge in dropping the verdict is from the excavation of the facts revealed to be carried out.

Keywords: Implementation of criminal sanctions, perpetrators, Illegal Logging